

## ABSTRAK

Suriadi Kusna Putra : *Kajian hukum tentang piutang tidak tertagih atas perjanjian penjualan produk secara kredit di Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) dihubungkan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia Nomor : KD 135/Dirkug/1017 tentang piutang pendapatan usaha dalam negeri.*

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT.Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan laba perusahaan. Salah satu upaya ini adalah memberikan fasilitas kredit kepada pelanggannya. Pemberian fasilitas kredit berdampak terhadap timbulnya piutang tidak tertagih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih, Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian piutang tidak tertagih dan Bagaimanakah proses penyelesaian piutang tidak tertagih tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan faktor penyebab terjadinya piutang tidak tertagih, kendala yang dihadapi dan mengetahui proses penyelesaiannya sehingga diharapkan dapat membuat sebuah konsep pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dan pengelolaan piutang yang dapat menimbulkan kesadaran hukum bagi pengguna jasa pos dan petugas pelaksana.

Penyebab timbulnya piutang tidak tertagih, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, seperti ; Kelemahan Standard Operating Procedure/persyaratan pemberian kredit, Administrasi dokumen, Kecurangan dan Kelalaian pegawai/tidak menghentikan kredit dan Tidak adanya law enforcement. Faktor faktor penyebab ini dilakukan kajian yang dikaitkan dengan peraturan peraturan serta teori teori hukum yang terkait yaitu teori Kedaulatan Negara, Teori Tanggung Jawab, Teori Effectivitas Hukum, Teori Perjanjian dan Teori Penyelesaian Sengketa.

Keberhasilan proses penanganan piutang, perlu dilakukan upaya preventif maupun represif seperti upaya penagihan secara litigasi/non litigasi, pembenahan internal sumber daya (Pembinaan/Pelatihan), revisi terhadap peraturan internal yang menjadi faktor penyebab, penegakan aturan/law enforcement serta sosialisasi tentang peraturan pengelolaan piutang.

Kata Kunci : Piutang tidak tertagih, Fasilitas Pemberian Kredit

## ABSTRACT

Suriadi Kusna Putra: *The legal review of uncollectible receivables on credit sales agreements in PT. Pos Indonesia (Persero) is connected with the Decision of the Board of Directors of PT. Pos Indonesia Number: KD 135 / Dirkug / 1017 on domestic operating income receivable.*

As a State-Owned Enterprise, PT.Pos Indonesia (Persero) is required to always strive to increase corporate profits. One of these efforts is to provide credit facilities to its customers. The granting of this credit facility has an impact on the receivables of uncollectible accounts.

The formulation of the problem in this research is What is the factor causing the occurrence of uncollectible receivables, What are the constraints faced in the process of settling uncollectible receivables and How the process of settling the receivables is not collectible.

The purpose of this research is to know and get the factors causing the occurrence of uncollectible receivables, constraints faced and know the process of completion so that it is expected to create a concept of implementation of credit facilities and receivables management that can generate legal awareness for service users post and implementing officers.

The cause of uncollectible receivables, can be caused by several factors, both internal and external, such as; Weaknesses Standard Operating Procedure / crediting requirements, Document administration, Fraud and Employee negligence / do not stop credits and No law enforcement. Factors contributing to this factor are related to the rules of law and related theories of legal theory, namely the theory of State Sovereignty, Responsibility Theory, Theory of Law Effectiveness, Theory of Agreement and Theory of Dispute Settlement.

The success of the process of handling of accounts receivable needs to be preventive or repressive such as litigation / non litigation levying, internal reinforcement of resources (Coaching / Training), revision of internal regulations that are the causal factors, law enforcement and socialization of regulation of receivable management .

Keywords: Bad Debt, Credit Facility